



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX  
AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI  
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Gibrannudin Effendi Al Rasyid

NIM 140810301157

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA  
KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Gibrannudin Effendi Al Rasyid

NIM 140810301157

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala karunia kesehatan dan kelancaran dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yaitu Papa Prihatin Effendi dan Mama Wiwik Istyawati yang telah memberi kasih, melimpahkan doa, dukungan serta upaya mereka baik materil dan non materil yang menjadi motivasi utama yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Saudariku tercinta Qilbaaini Effendi Muftikhali yang memberikan semangat dan do'a serta dukungan yang tiada henti.
3. Keluarga besar Bani Sutopo dan Bani Amin Sarmani yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi;
4. Guru-guru dari taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan segala ilmu;
5. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Semua sahabat seperjuangan atas kebersamaan dan harapan yang tercipta serta dukungannya selama ini;
7. Seluruh teman jurusan akuntansi angkatan 2014 yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

**MOTTO**

“Semakin berisi semakin merunduk”

Filosofi ilmu padi

“Hadapilah masalah jangan lari dari masalah”

My Beloved FATHER and MOTHER

“Don’t Follow your dreams. LEAD THEM”

Vladimir Putin

“Take a chance! All life is a chance. The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare”

Dr. Dale Carnegie

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gibrannudin Effendi Al Rasyid

NIM : 140810301157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Februari 2018

Yang menyatakan,

Gibrannudin E A R

NIM. 140810301157

**SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA  
KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Oleh:

**Gibrannudin Effendi Al Rasyid**

**NIM. 140810301157**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc.

Dosen Pembimbing II : Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja  
Keuangan Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada  
Perusahaan Manufaktur Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Gibrannudin Effendi Al Rasyid

NIM : 140810301157

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc.  
NIP 19880803 201404 2002

Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak.  
NIP. 19691011 199702 2001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistyو SE., M.Si., Ak., CA.  
NIP 19780927 200112 1002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi berjudul:**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN  
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Gibrannudin Effendi Al Rasyid

NIM : 140810301157

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati., M.Si., Ak (.....)  
NIP. 19660805 199201 2001

Sekretaris : Andriana, S.E., M.Sc, Ak (.....)  
NIP. 19820929 201012 2002

Anggota : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak., CA (.....)  
NIP. 19710217 200003 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

4x6

Dr. Muhammad Miqdad, S. E., M. M., Ak., CA.  
NIP. 19710727 199512 1001



**RINGKASAN**

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA;**

Gibrannudin Effendi Al Rasyid; 140810301157; 76 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sebuah perusahaan diciptakan dengan visi dan misi yang baik yaitu menuju satu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah kejayaan dan kekayaan yang mensejahterakan pemilik perusahaan dan semua yang ikut membantu perusahaan. Perusahaan di dalamnya memiliki banyak unsur yang saling terlibat diantaranya stakeholder, direktur perusahaan dan manajer. Eksistensi bisnis perusahaan didukung oleh para stakeholder, oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengungkapan sosial sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholder. Untuk mengawasi pertanggung jawaban perusahaan maka dibentuklah skema *good corporate governance* menurut Cahyani Nuswandari (2009) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Semakin bagus GCG yang semakin perusahaan dipercaya oleh para stakeholder. Peningkatan kepercayaan juga membawa perkembangan kinerja perusahaan yang positif termasuk bertambahnya pendapatan perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mendorong laba menjadi tinggi, maka dari itu beban pajak juga akan bertambah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr. Soemitro, SH dalam Resmi, 2017) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengharapakan semua wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia termasuk untuk membayar pajak sesuai dan tepat waktu. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat

menimbulkan terganggunya keuangan Negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance*. Perusahaan tidak ingin bahwa laba yang didapatkan dipotong pajak yang begitu besar, berhubungan dengan motivasi perusahaan yang tentunya ingin mendapatkan laba yang sebesar – besarnya. Menurut Sartori (2010) apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan dengan 15 perusahaan selama periode 2014-2016. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) dan analisis deskriptif statistik untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan dan memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi standar *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Penelitian dimulai dengan mentabulasi data-data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan. Setelah itu, mencari nilai *book tax gap* dan total akrual untuk di regresikan sehingga didapatkan nilai residu untuk dijadikan proksi penilaian *tax avoidance*. Kemudian mencari nilai IPCG dengan melakukan penilaian perusahaan berdasarkan laporan tahunan perusahaan, yang terakhir mencari nilai *return on assets* dari setiap perusahaan.

Model dalam penelitian terbebas dari masalah asumsi klasik atau bisa dikatakan model memenuhi standar *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ditolak. Hal tersebut berarti *good corporate governance* tidak mampu mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Kemudian semakin tinggi *return on assets* perusahaan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan *tax avoidance* karena menjadi sorotan pemerintah.

## SUMMARY

### **The Effect Of Good Corporate Governance And Company Financial Performance On Tax Avoidance In Manufacture Company At Indonesia;**

Gibrannudin Effendi Al Rasyid; 140810301157; 2018; 76 pages; Accounting Department, the Faculty of Economics and Business, University of Jember.

A company is created with a vision and a good mission that is toward a particular destination. That goal is the glory and wealth that prosper the company owner and all who help the company. The company has many interrelated elements including stakeholders, company directors and managers. The existence of the company's business is supported by the stakeholders, therefore the company must conduct social disclosure as responsibility to the stakeholders. To supervise corporate responsibility, a good corporate governance scheme was established by Cahyani Nuswandari (2009) Good Corporate Governance (GCG) is a set of systems that regulate and control the company to create added value for stakeholders. GCG spur the formation of a professional, transparent, clean and sustainable management pattern. The better GCG stakeholders will more trust to the company. Increased confidence also brings a positive growth in corporate performance including increased corporate earnings. Companies with good financial performance will drive profits into high, then the tax burden will also increase. Tax is a public fee to the state treasury under the law (which can be imposed) by not receiving a reciprocal service (contra) which can be directly demonstrated and used to pay public expenses. (Prof. Dr. Soemitro, SH in Resmi, 2017) Government through the Directorate General of Taxation expects all taxpayers to comply with tax laws in Indonesia including to pay taxes accordingly and on time. Non-compliance taxpayers may result in disruption of state finances. One way of non-compliance is tax avoidance. The company does not want that profits earned by taxes that are so large, related to the motivation of the company who would want to earn profits as big as possible. According Sartori (2010) if a company has a well-structured corporate governance mechanism will be directly proportional to the company's

compliance in fulfilling its tax obligations. The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of good corporate governance and corporate financial performance against tax avoidance.

The study was conducted with 15 companies during the period 2014-2016. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis and statistical descriptive analysis to give explanation in further research and give better result to regression analysis. Before multiple linear regression analysis, a classical assumption test was conducted to see if the regression model used in this study had met the Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) standard. Research begins by tabulating data obtained from annual financial statements and company annual reports. After that, look for book tax gap value and total accrual to regress so that the residual value is obtained to be a tax avoidance proxy. Then look for IPCG value by conducting a company appraisal based on the company's annual report, the latter looking for the return on assets of each company.

The model in the study is free of classical assumption problems or it can be said that the model meets the Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) standard. The results showed that hypotheses 1 and 2 in the study were rejected. This means that good corporate governance is not able to reduce tax avoidance action on the company. Then the higher return on assets companies tend not to do tax avoidance activities due to the government spotlight.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Miqdad, S. E., M. M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Rochman Effendi, S.E., M.Si, Ak.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, perhatian dalam membimbing penulis dan juga memberikan nasehat, semangat, dan do'a sebagai bekal menuju masa depan.
7. Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungann Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Ruang Baca FEB dan Perpustakaan Pusat;

9. Kedua orang tua, Prihatin Effendi dan Wiwik Istyawati, dan keluarga besar atas kasih sayang, do'a dan semangat yang tidak pernah putus;
10. Saudariku tercinta Qilbaaini Effendi Muftikhali yang selalu memberikan arahan, dorongan dan semangat.
11. Sahabat "Bersaudara", Achmad Reza, Angga Riski Saputra, Dentar Pri Anggy Adityah, dan Hasbi Yahya Sahroni yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan.
12. Teman serperjuangan mahasiswa Akuntansi FEB UNEJ angkatan 2014;
13. Kakak angkatan Bayu Aprillianto, yang bersedia meluangkan waktu untuk bermain bulutangkis.
14. Teman KKN 32, Setiawati Hemas U, Erlinda Dwi A, Elita Ismi M, Tito Isdian W, Rizky Dwi P, Elok Faiqotul H, M. Holis Andi W, Adinda W. K, Kholida Hidayati.
15. Kekasih hati yang memberikan semangat.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 08 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN/ <i>SUMMARY</i> .....	viiError! Bookmark not defined.
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Perusahaan dan Teori <i>Stewardship</i> .....	9
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i> .....	13
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> .....	13
2.1.4 Kinerja Keuangan dan Alat Ukur .....	16
2.1.5 Pajak .....	17
2.1.6 <i>Tax Avoidance</i> .....	18

2.2	<b>Penelitian Terdahulu</b>	19
2.3	<b>Kerangka Pemikiran Penelitian</b>	26
2.4	<b>Pengembangan Hipotesis</b>	26
2.4.1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4.2	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan pada <i>Tax Avoidance</i>	28
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>		29
3.1	<b>Desain Penelitian</b>	29
3.1.1	Jenis dan Sumber Data	29
3.1.2	Populasi dan Sampel	29
3.1.3	Metode Pengumpulan Data	30
3.2	<b>Definisi Operasional Variabel</b>	30
3.2.1	<i>Tax Avoidance</i> (Variabel Dependen)	30
3.2.2	<i>Good Corporate Governance</i> (Variabel Independen)	32
3.2.3	Kinerja Keuangan Perusahaan (Variabel Independen)	34
3.3	<b>Metode Analisis Data</b>	34
3.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	34
3.3.2	Uji Asumsi Klasik	34
3.3.3	Analisis Regresi	37
3.3.4	Uji Hipotesis	37
3.4	<b>Kerangka Pemecahan Masalah</b>	39
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		41
4.1	<b>Karakteristik Sampel Penelitian</b>	41
4.2	<b>Analisis Data</b>	42
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	44
4.2.3	Analisis Regresi Berganda	47
4.2.4	Uji Hipotesis	48



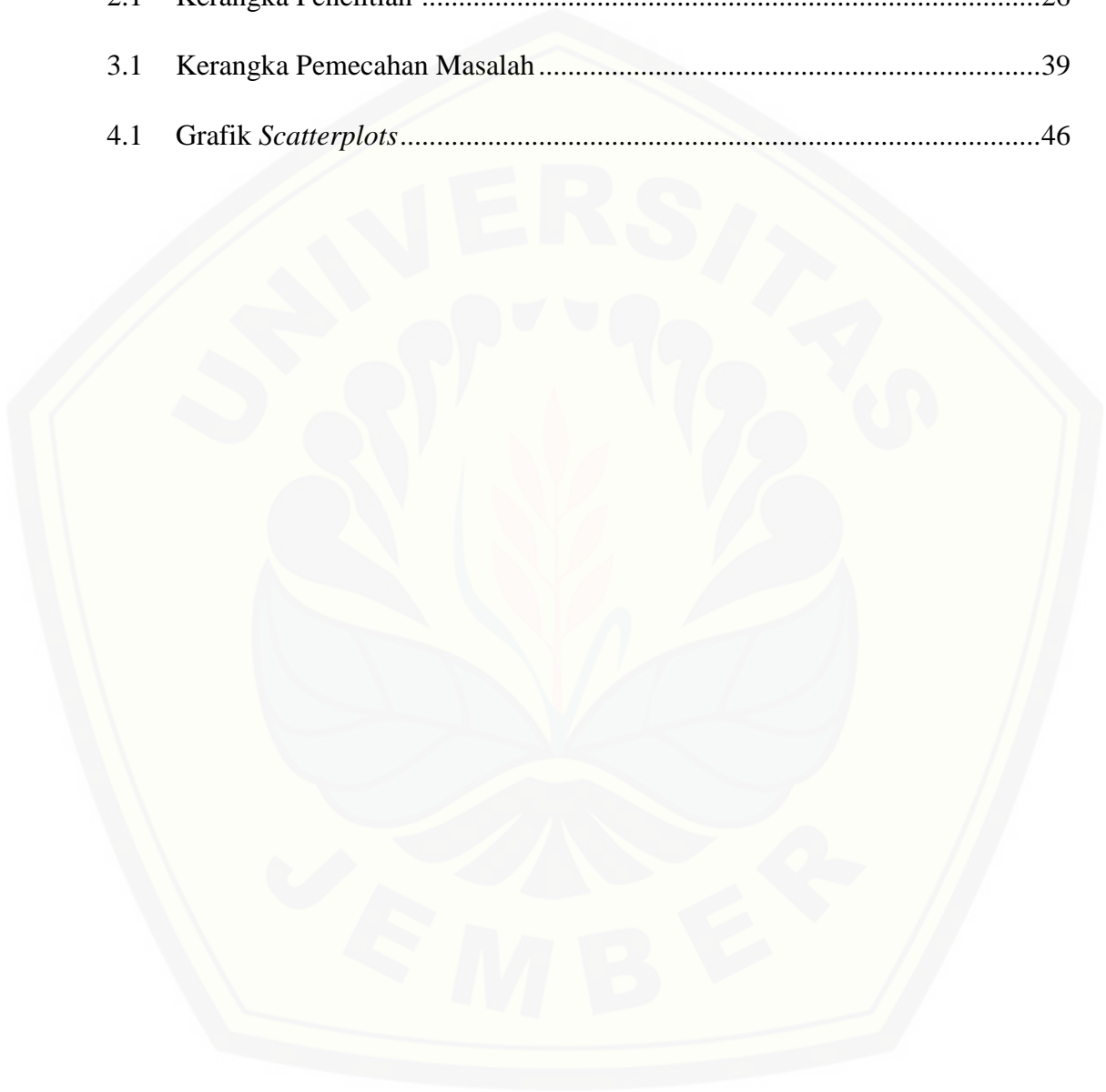
<b>4.3 Pembahasan</b> .....	51
4.3.1 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	51
4.3.2 Pengaruh Kinerja Keuangan perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	53
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	55
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	55
<b>5.2 Keterbatasan</b> .....	55
<b>5.3 Saran</b> .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
<b>LAMPIRAN</b> .....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Proporsi Perusahaan Manufaktur.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	36
4.1 Proses <i>Purposive Sampling</i> .....	41
4.2 Perusahaan Sampel .....	42
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	43
4.4 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	44
4.5 Hasil Uji Multikolonieritas .....	45
4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda .....	47
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinan .....	49
4.8 Hasil Uji Statistik F .....	49
4.9 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	50

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian .....	26
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	39
4.1 Grafik <i>Scatterplots</i> .....	46



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
4.1 Perhitungan <i>Book Tax Gap</i> , Total AkruaI dan Residual.....	63
4.2 Perhitungan Skor GCG dan ROA.....	65
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	67
4.4 Hasil Uji Normalitas .....	67
4.5 Hasil Uji Multikolonieritas .....	68
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	69
4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	69
4.8 Hasil Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.9 Model Penilaian Indeks <i>Good Corporate Governance</i> .....	71

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan diciptakan dengan visi dan misi yang baik yaitu menuju satu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah kejayaan dan kekayaan yang mensejahterakan pemilik perusahaan dan semua yang ikut membantu perusahaan. Perusahaan di dalamnya memiliki banyak unsur yang saling terlibat diantaranya *stakeholder*, direktur perusahaan dan manajer. Menurut Jones yang disetujui oleh Solihin (2009) *stakeholder* merupakan pihak – pihak yang memiliki kepentingan dan saling mempengaruhi perusahaan terdiri dari *stakeholder* dalam yaitu pemilik (pemegang saham), manajer dan karyawan. Sedangkan *stakeholder* luar adalah pihak yang bukan pemilik, pengelola ataupun karyawan perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan yaitu masyarakat luas, pasar modal dan pemerintah.

Eksistensi bisnis perusahaan tidak lepas dari dukungan para *stakeholder*, oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah dengan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan, laporan tahunan merupakan perangkat utama untuk menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan di perusahaan tersebut. Laporan tahunan menginformasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada para pemangku kepentingan dan pengguna informasi lainnya. Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan (Murtanto dan Elvina, 2005).

*Stakeholder* senantiasa mengawasi jalannya perusahaan melalui laporan tahunan dan laporan keuangan, tetapi untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dilaksanakanlah kebijakan *Good Corporate Governance*. Penerapan GCG di Indonesia sudah tertuang dalam surat Keputusan Menteri BUMN

No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (BPKP, 2017).

Menurut Nuswandari (2009) pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Segala aktivitas bisnis dijalankan dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa adanya kecurangan.

Menurut keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 dan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) perusahaan harus mengungkapkan unsur – unsur penerapan *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Hak – hak pemegang saham
2. Dewan komisaris
3. Dewan direksi
4. Komite audit
5. Komite nominasi dan remunerasi
6. Komite manajemen risiko
7. Komite – komite lain yang dimiliki perusahaan

8. Sekretaris perusahaan
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal
10. Manajemen risiko perusahaan
11. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris
12. Akses informasi dan data perusahaan
13. Etika perusahaan
14. Tanggung jawab sosial
15. Pernyataan penerapan GCG
16. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG

Unsur – unsur GCG yang diungkapkan di laporan tahunan perusahaan mencerminkan seberapa besar tingkat akuntabilitas perusahaan. Semakin banyak unsur GCG yang diungkapkan semakin perusahaan dipercaya oleh para *stakeholder*. Peningkatan kepercayaan juga membawa perkembangan kinerja perusahaan yang positif, misalnya untuk mencari modal perusahaan mudah sekali untuk mendapatkannya karena modal yang diberikan oleh investor ada laporan pertanggungjawabannya dari manajemen, digunakan untuk apa saja dan mendapat pengembalian yang jelas. Aktivitas operasi perusahaan yang bertambah juga meningkatkan pendapatan, antara perusahaan dan *stakeholder* akan sama – sama diuntungkan.

Kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat dari berbagai sisi dan pengukuran, seperti pada rasio profitabilitas menggunakan metode *Return on Assets*. ROA (*Return On Assets*) merupakan tingkat pengembalian atau laba yang dihasilkan dari pengelolaan asset maupun investasi perusahaan. Rasio ini biasa dipakai sebagai indikator akan profitabilitas perusahaan dengan membandingkan antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan. Sehingga diketahui bagaimana perusahaan bisa mengolah aset yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba sebesar – besarnya.

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mendorong laba mengarah ke perkembangan yang positif, maka dari itu beban pajak juga akan bertambah. Segala perusahaan yang berdiri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan badan usaha. Menurut Prof. Dr. Soemitro yang disetujui oleh Resmi (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber yang paling besar pada penerimaan negara, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 2009).

Menurut Djajadiningrat yang disetujui oleh Resmi (2017) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia yang mencapai 80% dari APBN. Pemerintah menasar banyak sektor untuk dipungut pajak, ada pajak perseorangan dan pajak badan. Pajak perseorangan adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak perseorangan, pajak badan adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak berupa badan misalnya perusahaan.



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semua wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia termasuk untuk membayar pajak sesuai dan tepat waktu. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance*, yaitu upaya *tax avoidance* secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagoal, 2007).

Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya *tax avoidance*. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Budiman dan Setiyono, 2012).

Perusahaan tidak ingin bahwa laba yang didapatkan dipotong pajak yang begitu besar, berhubungan dengan motivasi perusahaan yang tentunya ingin mendapatkan laba yang sebesar – besarnya. Seharusnya perusahaan yang menerapkan GCG cenderung untuk mematuhi peraturan dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, menurut Sartori (2010) apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menarik karena *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal serta untuk sekarang ini belum menemukan ujung dari penyelesaian masalah. Pada pandangan lain dengan kaitan pada pendapat Sartori tentang GCG dan *tax avoidance* apakah benar seperti itu realita di Indonesia sekarang ini. Pengungkapan GCG perlu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*, namun apakah perusahaan yang mencari sumber daya, menjual, mendapatkan pundi – pundi rupiah atau secara umum mencari penghidupan di Indonesia sudah menepati

kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan realitanya.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016. Alasan pertama adalah banyaknya perusahaan di sektor industri manufaktur dari pada di sektor lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (sesuai dengan tabel 1.1), selain itu untuk menghindari perbedaan karakteristik data laporan karena perbedaan sektor. Alasan kedua penelitian menggunakan perusahaan manufaktur karena menurut data *United Nations Statistics Division* (merdeka.com, 2017) pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Kemudian menurut Sekretaris Jendral Kementrian Perindustrian Republik Indonesia bapak Syarif Hidayat (kemenperin.go.id, 2015) mengungkapkan bahwa tingkat ekspor produk manufaktur Indonesia pada tahun 2015 sebesar 70,9% dari total ekspor nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur adalah sektor yang menghasilkan banyak pemasukan dan sangat berkontribusi bagi negara Indonesia namun berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tax to GDP ratio Indonesia pada tahun 2015 sebesar 11,8% masih tertinggal dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Rendahnya *tax ratio* karena kurangnya penerimaan pajak di Indonesia. Alasan menggunakan tahun 2014 – 2016 karena belum diteliti pada penelitian terdahulu, maka dari itu penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh sama, mendekati atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Proporsi perusahaan manufaktur di BEI

No	Tahun	Total Emiten Manufaktur	Total Emiten BEI	Persentase
1	2013	136	486	27,98%
2	2014	141	509	27,70%
3	2015	143	525	27,23%
4	2016	144	539	26,71%

Sumber: data diolah tahun 2017, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)

Penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi yang mana perusahaan semakin menerapkan GCG semakin melakukan praktik *tax avoidance*, seperti pada penelitian Zamhuri (2015); Zulkarnaen (2016) dan Wibawa et al (2016), selain itu kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas *return on asset* pada penelitian Santoso dan Muid (2014), Rachmithasari (2015) serta Hanum dan Zulaikha (2013) menunjukkan inkonsistensi hasil yang mana perusahaan dengan laba tinggi cenderung membayar pajak dengan taat sesuai ketentuan yang berlaku hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *good corporate governance* pada perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris :

1. Pengaruh penerapan *good corporate governance* di perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan :

1. Bagi dunia perpajakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan pengawasan
2. Bagi dunia usaha agar semakin taat untuk membayar kewajiban pajak perusahaan
3. Bagi masyarakat Indonesia agar selalu sadar membayar kewajiban pajak, karena pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara dan untuk kemajuan rakyat semesta.

## BAB 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Perusahaan dan Teori *Stewardship*

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya rancangan *Wetboek van Koophandel* (kitab Undang – Undang Hukum Dagang) yang kemudian berlaku di Netherland (Belanda) sejak tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandel* dinyatakan pula berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1848 hingga saat ini. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) Rencana Undang – Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus – putus, dengan terang – terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba (bagi diri sendiri) (Silondae dan Ilyas, 2016:29).

Organisasi (dalam maksud ini adalah perusahaan) adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda – beda, yang saling tergantung satu dengan lainnya, yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Pada dasarnya tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh organisasi adalah penciptaan kekayaan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan sebagai institusi pencipta kekayaan (*wealth-creating institution*) (Mulyadi dan Setyawan, 2007:1).

Perusahaan merupakan organisasi pencetak laba atau bisa dikatakan sebagai usaha untuk memperkaya diri dengan menggunakan dan menyatukan banyak elemen sumber daya. Bagaimana mengelola sumber daya tersebut sehingga mendapatkan nilai tambah secara ekonomis sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mengorbankan sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Kekayaan tersebut bisa dijadikan alat untuk mensejahterakan semua aspek yang mempunyai hubungan dengan

perusahaan tersebut. Motif ekonomi yang sudah terbentuk dari awal mula pembuatan perusahaan menjadi dasar yang sangat kuat bagi setiap pemangku kepentingan untuk mencari keuntungan sebanyak – banyaknya. Berbagai macam kegiatan yang dikerjakan di dalam maupun diluar perusahaan demi untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan yaitu mensejahterakan semua pihak yang berkepentingan di perusahaan. Perusahaan mempunyai berbagai macam bentuk baik berdasarkan badan hukum atau kepemilikan serta permodalan, bentuk – bentuk perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan yang mana perusahaan itu dijalankan oleh satu orang pengusaha sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja.
2. Persekutuan Firma (Fa) adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, umumnya mendirikan usaha atas dasar profesi atau keahlian yang sama dengan tanggung jawab tak terbatas serta menanggung bersama laba atau kerugian.
3. Persekutuan Komanditer (CV) adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda diantara anggotanya.
4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian dan nilai kepemilikannya hanya berdasarkan pada berapa modal yang disetorkan (sistem saham) (Silondae dan Ilyas, 2016:43).

Perseroan Terbatas (PT) dalam UU no 40 tahun 2007 dijelaskan merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya pemiliknya pada perusahaan tersebut hanya sebatas saham yang dimilikinya. Jelas terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan, berarti terdapat pemisahan kegiatan juga antara pemilik dengan yang menjalankan atau mengelola perusahaan. Terdapat 3 komponen dalam perseroan yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh direksi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemegang saham yang mana diselenggarakan sekali dalam setahun atau apabila ada keadaan mendesak dan harus diadakan RUPS lagi dalam tahun tersebut dinamakan RUPS Luar Biasa. Dalam RUPS dibahas mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi serta dewan komisaris, membagikan dividen bagi pemegang saham perusahaan dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan.

Dewan direksi bertugas sebagai pengurus perseroan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan UU no 40 tahun 2007 pasal 98 ayat (1). Tak hanya itu dewan direksi bertugas menjalankan perseroan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan awal dari para pemangku kepentingan seperti pada teori *stewardship*. Menurut Raharjo (2007) dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Meskipun para *steward* berperilaku sesuai arahan pemilik fungsi pengawasan tetap harus dijalankan, maka dari itu ditunjuklah dewan direksi untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan direksi adalah komponen perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kemudian pengawasan

dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Silondae dan Ilyas, 2016:48).

Dewan komisaris ini terdiri dari satu/dua atau bisa lebih dari itu dan meliputi komisaris independen dan utusan. Komisaris independen ditunjuk sesuai RUPS dari orang atau pihak yang tidak ada hubungannya dengan pemegang saham utama, direksi maupun dewan komisaris yang lain. Kemudian komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat dewan komisaris. Dewan komisaris independen dan utusan sama – sama menyeimbangkan fungsi pengawasan serta harus benar – benar secara independen mengawasi perusahaan karena dalam realitanya banyak kasus dalam perusahaan yang mana terjadi kecurangan yang besar dikarenakan fungsi pengawasan yang lemah serta kurangnya independensi dari pengawas.

Laporan hasil dari kegiatan operasional (termasuk laporan keuangan dan tahunan) haruslah benar – benar mencerminkan realita yang ada, karena laporan tersebut akan dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutuskan sebuah langkah yang akan diambil perusahaan di masa yang akan datang. Maka sangat krusial segala kandungan yang ada di dalam laporan hasil tersebut bisa mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil. Laporan tahunan dan laporan keuangan tidak hanya untuk internal perusahaan saja namun dalam era modern, segala informasi harus dibuka ke publik untuk perusahaan yang sudah *go public* atau sudah masuk di bursa efek untuk jual beli saham perusahaan. Pemegang saham publik juga harus mengetahui bagaimana aktivitas perusahaan apakah baik atau buruk, kinerja keuangannya baik atau buruk dan semua penilaian yang perlu bagi pemegang saham. Apabila ketidak transparan suatu perusahaan ataupun ketidak jujuran suatu perusahaan dalam laporan keuangannya kemudian setelah diaudit ditemukan banyak terjadi kecurangan maka kepercayaan dari para pemegang saham akan luntur serta nilai dan citra perusahaan akan buruk yang berdampak pada aktivitas badan usaha itu sendiri baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.



### 2.1.2 Teori Stakeholder

Perusahaan berdiri didukung oleh banyak pihak dan faktor, termasuk *stakeholder*. Maka dari itu *stakeholder* menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab baik secara sosial maupun material. Menurut Indrawati (2009) teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dengan *stakeholder*. Menurut Jones yang disetujui oleh Solihin (2009) membagi *stakeholder* pada dua kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.

- *Inside stakeholders*, terdiri dari atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para manajer dan karyawan.
- *Outside stakeholders*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

### 2.1.3 Good Corporate Governance

#### a. Pengertian Good Corporate Governance

Adanya fenomena praktik – praktik yang kurang jujur seperti skandal Enron dan Kimia Farma mendorong para praktisi untuk mengembangkan apa yang disebut dengan *Good Corporate Governance*. Pemerintah Indonesia sendiri mengembangkan prinsip GCG dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi 1998 yang melanda kala itu. Sebagai akibat jatuhnya ekonomi Indonesia karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya praktik yang bersih dan kinerja yang baik pada perusahaan – perusahaan Indonesia serta pemerintah ingin lebih menstimulus perkembangan ekonomi Indonesia untuk lepas dari jeratan krisis ekonomi.

Pemerintah Indonesia membentuk satu lembaga khusus untuk mengembangkan dan membenahi sistem tata kelola perusahaan, yaitu Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui keputusan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000. Dengan tujuan merumuskan pedoman umum GCG yang terbit pada tahun 2001. Tahun 2004 KNKCG berubah nama menjadi KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance).

Pengertian GCG menurut Cahyani Nuswandari (2009) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan.

Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes dan Ardana, 2017:101).

Menurut OECD yang disetujui oleh (Agoes dan Ardana, 2017:102) *The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance*. Mempunyai arti suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat – alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

Prinsip – prinsip yang di kemukakan dalam konsep *Good Corporate Governance* menurut KNKG ialah :

- a. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Responsibilitas
- e. Kemandirian (*independensi*)

Semakin tinggi nilai perusahaan di pasar modal semakin tinggi pula kinerja perusahaan tersebut, pengaruh nilai perusahaan akan menjadikan manajemen sangat akuntabel untuk memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang sahamnya. GCG dirumuskan memiliki tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua unsur yang berkaitan dengan perusahaan, meminimalisir manipulasi atau kecurangan dalam perusahaan, serta memberikan rasa percaya bagi para pemangku kepentingan.

Manfaat dan tujuan GCG menurut Surya dan Yustiavandana (2007) adalah :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
- b. Mendapatkan biaya modal yang lebih murah
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

**b. Mekanisme Pengungkapan GCG**

Menurut keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 dan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006) perusahaan harus mengungkapkan unsur – unsur penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. Hak – hak pemegang saham
2. Dewan komisaris
3. Dewan direksi
4. Komite audit
5. Komite nominasi dan remunerasi
6. Komite manajemen risiko
7. Komite – komite lain yang dimiliki perusahaan
8. Sekretaris perusahaan
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal
10. Manajemen risiko perusahaan
11. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris
12. Akses informasi dan data perusahaan
13. Etika perusahaan
14. Tanggung jawab sosial
15. Pernyataan penerapan GCG
16. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan Perusahaan dan Alat Ukur**

Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil tercermin pada kinerja keuangan perusahaan tersebut, bagaimana kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau buruk bisa menggunakan berbagai macam alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya menggunakan analisis rasio profitabilitas *Return on Assets*. Rasio profitabilitas menurut Kasmir (2008:196) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Return on Asset (ROA) yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aktiva (Najmudin, 2011:88). ROA merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jadi semakin tinggi ROA semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakannya dan sebaliknya semakin rendah ROA semakin kecil kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakannya (Sunaryo, 2011).

ROA (*Return On Assets*) merupakan tingkat pengembalian atau laba yang dihasilkan dari pengelolaan aset perusahaan. Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan, dengan demikian ROA dapat dijadikan salah satu indikator dalam pengambilan keputusan investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Maka semakin tinggi rasio ini maka akan semakin tinggi pula kepercayaan dan minat investor untuk berinvestasi. (Diaz dan Jufrizen, 2014)

Jadi dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan *Return on Assets* merupakan salah satu alat ukur yang tepat, karena sudah mencakup sumber daya yang digunakan untuk operasi perusahaan terhadap laba yang dihasilkan. *Return on Assets* menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Perusahaan Setelah Pajak}}{\text{Aktiva}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Pajak

Menurut Prof. Dr. Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Resmi (2017), ciri – ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### **2.1.6 Tax Avoidance**

Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Santoso dan Muid, 2014).

Peristiwa tahun 2016 tentang “Panama Papers” membuat banyak orang untuk mengetahui bagaimana mekanisme perpajakan yang benar – benar terjadi di Indonesia termasuk untuk isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memang sedikit mirip dengan penggelapan pajak, tetapi ada perbedaan diantara keduanya. Penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan *tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Ibnu Wijaya, 2014).

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan, akhir-akhir ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh manajemen dalam meminimalkan beban pajak, dapat memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Rijal, 2014).

Menurut Darussalam dan Septriadi (2009) skema *tax avoidance* bisa dilakukan seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*. Wajib pajak bisa melakukan *tax avoidance* dengan bentuk pemindahan subjek dan objek pajak ke negara surga pajak atau *tax haven country*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian pernah dilakukan untuk membahas topik *tax avoidance* ini namun menggunakan metode yang berbeda serta menggunakan variabel yang berbeda pula.

Fadhilah Rahmi (2014) Universitas Negeri Padang melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)* dengan hasil penelitian pada keempat variabel bebas :

- a. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*
- b. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*
- c. Komite audit berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*
- d. Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*

Annisa dan Kurniasih (2012) Universitas Sebelas Maret melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* dengan hasil penelitian pada kelima variabel bebas :

- a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*
- b. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*
- c. Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*
- d. Komite audit berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*
- e. Kualitas audit berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Agung Wibawa, Wilopo dan Yusri Abdillah (2016) Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)* dengan hasil penelitian:

Komite audit perusahaan (X2), persentase dewan komisaris independen (X1) dan kualitas auditor eksternal (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014) Universitas Diponegoro melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap penghindaran Pajak Perusahaan* dengan hasil penelitian:

- a. Jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- b. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- c. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- d. Kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak



- e. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- f. Kinerja perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- g. Tingkat hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	Annisa dan Kurniasih (2012)	<i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional, Komposisi dewan komisaris, Dewan Komisaris, Komite audit, Kualitas audit	Kepemilikan institusional, Komposisi dewan komisaris dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan Kualitas audit berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
<b>2</b>	Tommy Kurniasih dan	<i>Tax avoidance</i>	Return On Assets,	Return on Assets (ROA),

	Maria M Ratna Sari (2013)		Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal	Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Leverage dan Corporate Governance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Fadhilah Rahmi (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Proporsi kepemilikan institusional, Proporsi dewan komisaris independen, Komite audit, dan Kualitas audit	Proporsi kepemilikan institusional dan Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> .

---

					Komite audit, dan Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
4	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Penghindan pajak	<i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan</i>	<i>Corporate governance</i>	berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan. ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

---

---

5	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional (X1), proporsi dewan komisaris kualitas audit (X2), kualitas kepemilikan insitusal (X3), ROA (X4), ROA (X5), dan risiko perusahaan (X6)	Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan kepemilikan insitusal yang merupakan proksi dari corporate governance berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . ROA berpengaruh negatif terhadap variabel dependen sedangkan risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap
---	-----------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

				variabel dependen
<b>6</b>	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Risiko perusahaan (X1), ukuran perusahaan (X2), <i>multinational company</i> (X3), kepemilikan institusional (X4), proporsi dewan komisaris indepeden (X5), kualitas audit (X6), dan komite audit (X7)	Hanya variabel independen risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
<b>7</b>	Silvia Ratih Puspita, Puji Harto (2014)	Penghinda ran pajak	Tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan	Tata kelola tidak berpengaruh signifikan sedangkan karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh

				positif signifikan.
<b>8</b>	Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014)	Penghindan Pajak	Jumlah dewan komisaris, Proporsi komisaris independen, Kompensasi eksekutif, Kepemilikan saham, Ukuran perusahaan, Kinerja perusahaan, dan Tingkat hutang	Jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan kompensasi eksekutif, kepemilikan saham, ukuran perusahaan, kinerja dan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap variabel dependen
<b>9</b>	Annisa Fadilla Rachmithasari (2015)	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on assets, leverage, corporate governance,</i>	ROA, <i>leverage,</i> dan kompensasi rugi fiskal

			ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal	berpengaruh positif sedangkan CG berpengaruh negatif
<b>1</b>	Fitri	<i>Tax</i>	Komite	Komite
<b>0</b>	Damayanti dan Tridahus Susanto (2015)	<i>Avoidance</i>	Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return On Assets</i>	Audit dan ROA berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Sedangkan kualitas audit, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
<b>1</b>	Agung Wibawa, Wilopo dan Yusri Abdillah (2016)	Penghindaran Pajak	Komite audit perusahaan (X2), persentase dewan komisaris independen (X1) dan kualitas	X1, X2 dan X3 berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak

				auditor eksternal (X3)	
<b>2</b>	<b>1</b>	Muhammad Rizal (2016)	<i>Tax avoidance</i>	CSR, ROA, komisaris independen dan Tobin Q	CSR tidak berpengaruh, ROA berpengaruh negatif, komisaris independen tidak berpengaruh sedangkan Tobin Q tidak berpengaruh.
<b>3</b>	<b>1</b>	Jeongho Kim dan Chaechang Im (2017)	<i>Tax avoidance</i>	CSR, <i>profitability</i> , likuiditas, produktivitas, aktivitas dan pertumbuhan	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
<b>4</b>	<b>1</b>	Moses Dicky Saputra Nur Fadrijih Asyik (2017)	<i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas, Leverage dan Corporate governance	Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan, leverage berpengaruh positif signifikan dan



---

GCG  
berpengaruh  
negatif  
signifikan  
terhadap *tax  
avoidance*.

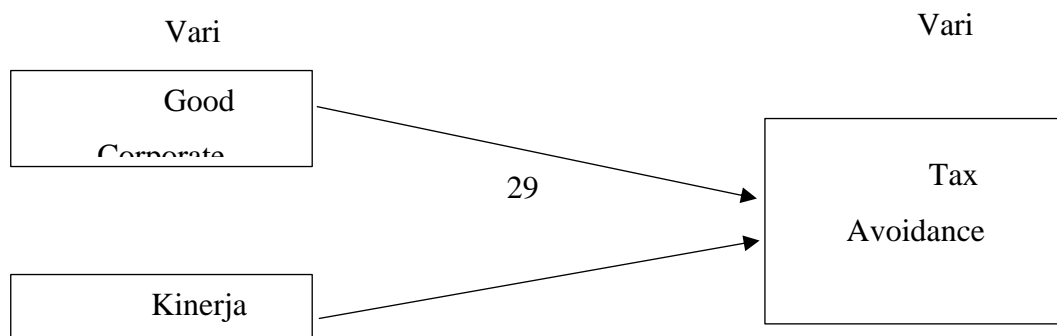
---

Sumber : berbagai referensi

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu tetapi memiliki perbedaan, perbedaan itu terdapat pada variabel independen yaitu GCG ditambah dengan variabel kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran pengungkapan GCG juga menggunakan metode checklist yang akan diukur dengan 16 item pengungkapan GCG secara lengkap dan menyeluruh, metode tersebut akan memberikan variasi baru dalam penelitian sebelumnya. Variabel kinerja keuangan perusahaan akan diukur menggunakan rasio profitabilitas perusahaan *Return on Assets* (ROA) yang menghitung seberapa besar tingkat perusahaan menghasilkan laba dari pengelolaan aset perusahaan. Penggunaan dua variabel independen GCG dan kinerja keuangan perusahaan bagus karena *tax avoidance* tidak hanya dinilai dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi juga dari perspektif kinerja keuangan perusahaan yang akan memberikan informasi lebih baik dan penelitian yang lebih variatif dari penelitian sebelumnya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini akan diuji variabel dan faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Variabel yang digunakan adalah dependen dan independen yang mana variabel dependen berupa *tax avoidance* (*tax avoidance*). Kemudian pada variabel Independen terdapat 2 variabel yaitu *tax avoidance* dan kinerja keuangan perusahaan.



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* pada *Tax Avoidance*

Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes dan Ardana, 2017:101). Menurut Nuswandari (2009) GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan.

Hubungan antara sistem tata kelola perusahaan yang baik dan transparan dengan para pemangku kepentingan bisa dijelaskan dengan dasar teori *stakeholder*. Perusahaan berdiri didukung oleh banyak pihak dan faktor, termasuk *stakeholder*. Maka dari itu *stakeholder* menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab baik secara sosial maupun material. Menurut Indrawati (2009) teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dengan *stakeholder*.

Menurut hasil penelitian sebelumnya oleh Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan kepemilikan insitusal yang merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), menunjukkan hasil variabel

*corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena dari dewan komisaris dan direksi memiliki prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan terutama dengan diterapkannya *good corporate governance* pada perusahaan. Kemudian komite audit selalu menjadi komponen dari *good corporate governance* sehingga komite ini menjadi pengawas dibawah dewan komisaris sebagai fungsi pengawasan, sehingga dengan pengawasan dari berbagai struktur perusahaan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Secara logika semakin bagus tata kelola perusahaan akan membangun budaya organisasi yang profesional dan akuntabel, sehingga menghindarkan perusahaan dari perilaku *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **2.4.2 Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan pada *Tax Avoidance***

Menurut Sunaryo (2011) ROA merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jadi semakin tinggi ROA semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakannya.

Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar tidak lepas dari kinerja para personil perusahaan dan pemangku kepentingan, kesamaan niat untuk mencapai tujuan dari perusahaan bisa dijelaskan pada teori *stewardship*. Menurut

Raharjo (2007) dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Penelitian terdahulu oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Puspita dan Harto (2014) berpengaruh positif dan signifikan. Kim dan Im (2017) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena menurut Chen, et all (2010) perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara menghindari pajak.

Secara logika performa kinerja keuangan perusahaan yang bagus akan memberikan perusahaan laba yang tinggi. Namun perusahaan perlu untuk membayar pajak sebagai bentuk iuran kepada pemerintah karena mendapatkan keuntungan di negara Indonesia. Pajak disesuaikan dengan banyaknya laba yang tercatat dalam satu tahun operasi bisnis, dengan laba yang besar maka perusahaan membayar pajak yang besar pula. Maka dari itu perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari pajak. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

#### 3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Seluruh data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014, 2015 dan 2016. Sumber data yang digunakan diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

#### 3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan manufaktur pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berjumlah 144 perusahaan. Populasi tersebut akan dikerucutkan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut (tidak *delisting*) selama periode pengamatan.
2. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan tahunan yang sudah di audit dan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2014 – 2016 yang dapat diakses di situs Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
3. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
4. Perusahaan manufaktur menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah dan/atau dollar.
5. Laporan keuangan memiliki data yang dibutuhkan selama periode pengamatan yaitu :

- a. Perusahaan menyajikan laporan laba perusahaan sebelum pajak.
  - b. Perusahaan menyajikan perhitungan beban pajak kini.
6. Perusahaan manufaktur yang memiliki peredaran bruto diatas 50 miliar rupiah per tahun untuk menjaga keseragaman tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% per tahun.
  7. Perusahaan tidak mengalami BTG negatif karena semakin besar nilai BTG maka semakin besar tingkat penghindaran pajaknya (Santoso dan Muid, 2014). Selain itu untuk mencegah distorsi data karena nilai BTG dari setiap pengamatan akan dikonversi menggunakan log agar jumlah bilangan hasil perhitungan bisa diperkecil.

### **3.1.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data apa saja yang terkait dengan penelitian ini. Data tersebut berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan diambil dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) diteliti kemudian dipelajari satu persatu.

## **3.2 Definisi Operasional Variabel**

### **3.2.1 Variable Dependen**

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax avoidance* sendiri sulit untuk diukur karena tindakan tersebut merupakan rahasia perusahaan sehingga perusahaan enggan untuk mengungkapkan. Selain itu data Surat Pemberitahuan Tahunan pajak perusahaan merupakan hal yang sulit didapat, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan yang mampu dijadikan ukuran sebagai tindak *tax avoidance*. Peneliti menggunakan model *abnormal book tax gap* yang dikembangkan Desai dan Dharmapala dalam Sirait dan Martani (2014) yaitu nilai residu dari regresi *book tax gap* (Manzon dan Plesko, 2002) dengan model manajemen laba dari Healy (1985) yang akan dijadikan proksi

dari *tax avoidance*. *Book tax gap* atau bisa disebut *book tax difference* adalah perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi karena adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dengan peraturan standar akuntansi. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) *book tax gap* dapat dijadikan sebagai sumber yang patut dicurigai dalam menilai agresivitas pelaporan keuangan untuk tujuan perpajakan (*tax avoidance*) dan manipulasi laba.

Menurut Maraya dan Yendrawati (2016) penghindaran pajak erat kaitannya dengan manajemen laba. Ketika manajer memanipulasi laba ke atas, manajer dihadapkan pada dua pilihan, antara pelaporan penghasilan kena pajak pada jumlah yang lebih tinggi sehingga pembayaran pajak meningkat atau dengan jumlah yang lebih rendah (menciptakan *book tax gap*) yang dapat menurunkan kredibilitas laba pada laporan keuangan. Rumus *book tax gap* Manzon dan Plesko (2002) adalah sebagai berikut :

$$Book\ tax\ gap = \text{Laba bersih sebelum pajak} - \text{laba kena}$$

*Book tax gap* mencerminkan perbedaan temporer dan sementara, laba sebelum pajak didapatkan di dalam laporan laba rugi konsolidasian perusahaan. Laba kena pajak atau pendapatan kena pajak diambil dari perhitungan beban pajak kini dibagi dengan tarif pajak yang berlaku (25%). Setelah diketahui nilai *book tax gap* maka selanjutnya akan diregresikan dengan model manajemen laba Healy (1985) yaitu:

$$TAK_{it} = (\Delta Ca_{it} - \Delta Cl_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} -$$

Keterangan :

$TAK_{it}$  : Total akrual perusahaan i pada periode t

$\Delta Ca_{it}$  : Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke t

$\Delta Cl_{it}$  : Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t

$\Delta Cash_{it}$ : Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada periode ke t

$\Delta STD_{it}$  : Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam hutang lancar perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$Dep_{it}$  : Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$Ai_{t-1}$  : Total aktiva perusahaan  $i$  pada periode ke  $t-1$

Persamaan regresi *book tax gap* dengan total akrual adalah sebagai berikut :

$$BTG = \alpha +$$

Keterangan :

BTG : *Book tax gap* Manzon dan Plesko

$\alpha$  : Koefisien regresi

TAK : Total akrual Healy

$\varepsilon$  : Residual

Nilai residu dari regresi antara *book tax gap* dengan model manajemen laba yang akan dipakai peneliti dalam mengukur *tax avoidance*. *Abnormal book tax gap* digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Sirait dan Martani (2014).

### 3.2.2 Variabel Independen

#### a. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* atau biasa disingkat menjadi GCG menjadi variabel independen (bebas) yang akan mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini diukur menggunakan item-item yang diklasifikasikan menjadi 16 *item* utama berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 dan Pedoman Umum Penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG,2006) yang terdiri dari :

1. Hak – hak pemegang saham
2. Dewan komisaris
3. Dewan direksi
4. Komite audit



5. Komite nominasi dan remunerasi
6. Komite manajemen risiko
7. Komite – komite lain yang dimiliki perusahaan
8. Sekretaris perusahaan
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal
10. Manajemen risiko perusahaan
11. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris
12. Akses informasi dan data perusahaan
13. Etika perusahaan
14. Tanggung jawab sosial
15. Pernyataan penerapan GCG
16. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG

Dari keenam belas *item* utama tersebut, total terdapat 105 sub-*item* pengungkapan yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance* (Rini, 2010: 35). Kemudian pada penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) dengan daftar item pengungkapan GCG, laporan tahunan perusahaan diperiksa. Apabila dalam laporan tahunan perusahaan diungkapkan salah satu item penilaian maka diberi nilai “1” jika tidak diungkapkan diberi nilai “0”, kemudian diolah dengan rumus :

<b>IPCG</b>
-------------

--

Keterangan :

IPCG : Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*

$\Sigma X$  : Total skor yang didapat perusahaan

nP : Total skor maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan

Dari aplikasi rumus tersebut akan diperoleh indeks pengungkapan *corporate governance* yang dijadikan dasar apakah pengungkapan *corporate governace* perusahaan sudah maksimal atau kurang maksimal.

#### **b. Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan perusahaan akan diukur menggunakan rasio profitabilitas ROA yaitu seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio profitabilitas perusahaan diukur menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Perusahaan Setelah Paiaik}}{\text{Aktiva}} \times 100\%$$

(Najmudin, 2011 : 88).

### **3.3 Metode Analisis Data**

#### **3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016:19).

#### **3.3.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian menggunakan regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan uji regresi atau tidak.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016:154). Dalam penelitian ini dipilih uji statistik *Kolmogorv-Smirnov* dengan melihat tingkat signifikasinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Adapun hipotesis yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Data residual terdistribusi normal

H<sub>a</sub>: Data residual terdistribusi tidak normal

Suatu regresi yang memiliki distribusi data residual normal apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifiaksi lebih besar dari 0,05.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan (2) *variance inflation factor* (VIF) nilai yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ . Apabila sama dengan nilai tersebut maka terjadi multikolonieritas, jika sebaliknya nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016:103).

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016 p. 134). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji grafik *scatterplot*. Dasar analisis uji *scatterplot* (Ghozali, 2016) yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi analisis regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Metode yang digunakan adalah uji Durbin – Watson (Ghozali, 2016:107) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi positif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2016

### 3.3.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang akan digunakan untuk menguji variabel independen pada variabel dependen adalah sebagai berikut :

$$TA = \alpha + \beta_1 IPCG + \beta_2 ROA + \varepsilon$$

Keterangan :

- TA : *Tax Avoidance*  
IPCG : *Good Corporate Governance*  
ROA : Kinerja Keuangan Perusahaan  
 $\alpha$  : Konstanta Persamaan Regresi  
 $\beta$  : Koefisien Regresi  
 $\varepsilon$  : Kesalahan Residual

### 3.3.4 Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

**b. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)**

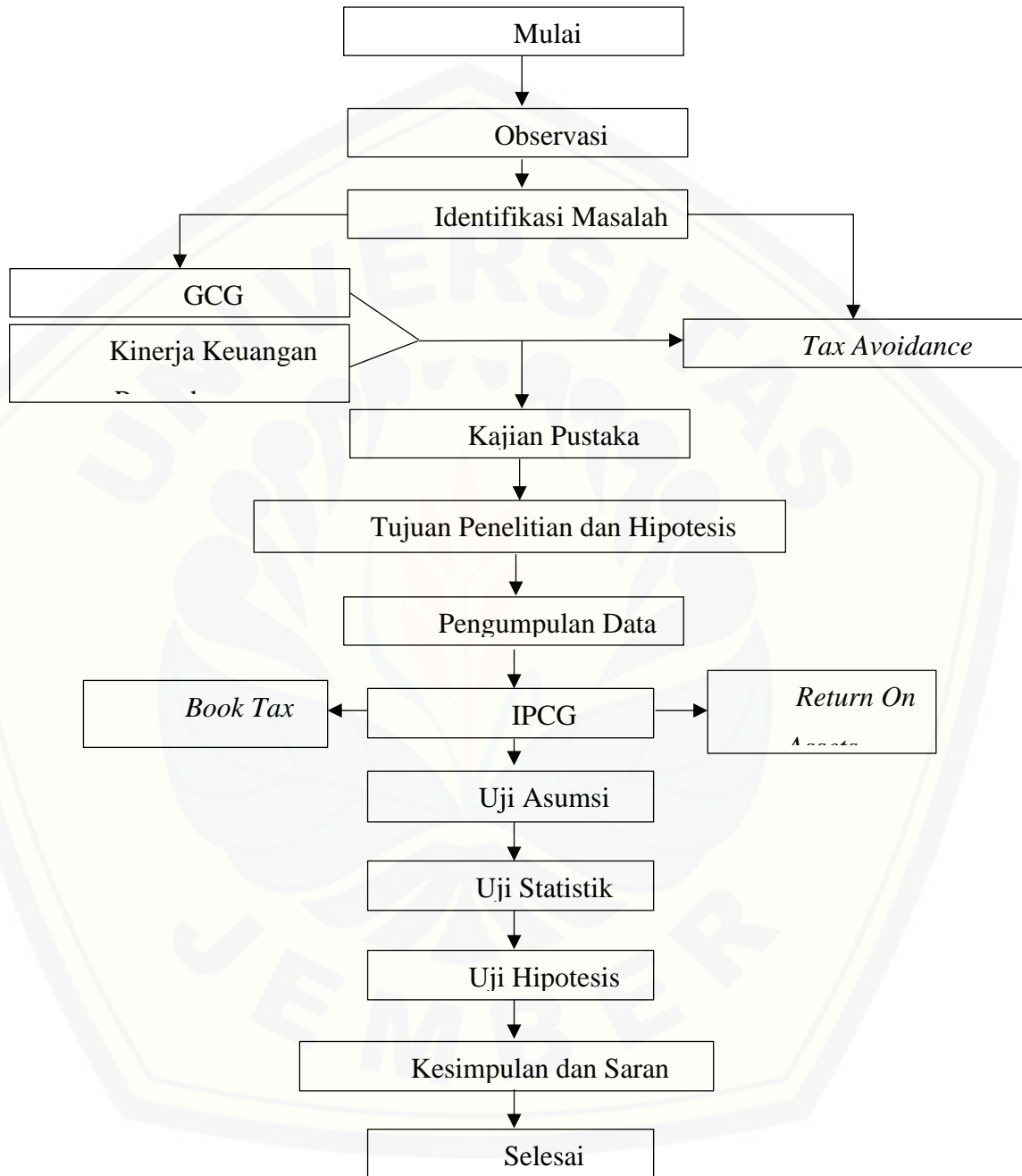
Uji statistik F merupakan uji signifikansi pada keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau  $sig < 0,05$ , menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $sig > 0,05$ , menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 96).

**c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pada uji ini, nilai t hitung akan dibandingkan nilai t tabel dengan:

- Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau probabilitas  $<$  tingkat signifikansi ( $Sig \leq 0,05$ ), maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau probabilitas  $>$  tingkat signifikansi ( $Sig \geq 0,05$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.4 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan :

1. Memulai penelitian dengan melakukan pengamatan pada fenomena dan peristiwa yang terjadi kemudian ditemukan masalah yang bisa dijadikan penelitian.
2. Mengidentifikasi masalah dan mengkaji secara pustaka menggunakan buku – buku, jurnal dan penelitian terdahulu kemudian muncul hipotesis awal penelitian.
3. Pengumpulan data penelitian dengan mendownload data sekunder dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.
4. Pengolahan data variabel dependen dan independen menggunakan rumus – rumus.
5. Data yang sudah diolah akan diuji menggunakan uji asumsi klasik.
6. Setelah data lolos uji maka selanjutnya akan dianalisis secara regresi berganda kemudian hasil akan dibandingkan dengan hipotesis awal penelitian.
7. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diperlukan.
8. Penelitian selesai.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan terhadap perilaku *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2014 – 2016. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini diperoleh bukti bahwa:

- a. Semakin baik perusahaan menerapkan *good corporate governance* maka praktik *tax avoidance* akan bertambah karena komponen *good corporate governance* lebih mengutamakan tanggung jawab dan memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham (*stakeholder* dalam) sehingga pemerintah selaku *stakeholder* luar tidak terlalu diperhatikan.
- b. Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan maka akan membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan performa keuangan yang tinggi maka cenderung memperkecil praktik *tax avoidance* karena mampu mengelola pajak sesuai ketentuan dan laba yang tinggi membuat perusahaan sanggup untuk membayar pajak selain itu adanya denda dan turunnya reputasi perusahaan apabila terbukti melakukan *tax avoidance*.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, yang dirasa kurang untuk membuka faktor lain dalam praktik *tax avoidance* (*tax avoidance*) di perusahaan.
- b. Penelitian ini hanya terfokus terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan responden.
- c. Penelitian ini mengamati perusahaan dengan periode yang relatif pendek yaitu 3 tahun pada tahun 2014 – 2016.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen tambahan yang lain untuk mengidentifikasi faktor terjadinya *tax avoidance* (*tax avoidance*) di perusahaan seperti kompensasi rugi fiskal, karakteristik manajemen dan sebagainya.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden dari seluruh perusahaan dari berbagai kategori yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga karakter perusahaan yang digunakan lebih bervariasi.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode pengamatan tahun pada sampel sehingga diperoleh pengamatan yang lebih banyak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes dan Ardana. 2017. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Annisa dan Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Solo: *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. B(2): 95 – 189.
- Bhuiyan, Md Hamid Ullah and P.K. Biswas. 2007. Corporate Governance and Reporting: An Empirical Study of The Listed Companies in Bangladesh., *Journal of Business Studies*. XXVIII(1).
- Bisnis Indonesia. 2015. Kontribusi Industri Manufaktur Melesat. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14532/Kontribusi-Industri-Manufaktur-Melesat>. [Diakses pada 23 Januari 2018].
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. 91(1): 41-61.
- Damayanti dan Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5(2): 187-206.
- Darmawan dan Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(1): 143-161.
- Darussalam dan Septriadi. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion dan Anti AvoidanceRule. [www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6](http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6). [Diakses pada 07 Februari 2018).

- Dewi dan Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6(2): 249-260.
- Diaz dan Jufrizen. 2014. Pengaruh Return On Assets (Roa) Dan Return On Equity (Roe) Terhadap Earning Per Share (Eps) Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis*. 14(02).
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi empat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*. 50(40): 127 – 178.
- Hanum dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2(2): 1-10.
- Healy, P.M. 1985. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*. 7: 85-107.
- Hutagoal, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrawati, N. 2009. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Annual Report serta Pengaruh Political Visibility dan Economic Performance. *Pekbis Jurnal*. 1: 1-11.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Kim and Im. 2017. Study On Corporate Social Responsibility (CSR): Focus On Tax Avoidance And Financial Ratio Analysis. *MDPI Journal Sustainability*. 9(1710).
- KNKG. 2016. Profil dan Visi Misi KNKG. [www.knkg-indonesia.org/about](http://www.knkg-indonesia.org/about). [Diakses pada 20 Oktober 2017].
- Kurniasih dan Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. 18(1).
- Maharani dan Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(2): 525-539.
- Manzon and Plesko. 2002. The Relation Between Financial and Tax Reporting Measure of Income. *Tax Law Review*. 55: 175 – 214.
- Maraya dan Yendrawati. 2016. Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. 20(2).
- Mulyadi dan Setyawan. 2007. *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Murtanto dan Elvina. 2005. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6(1): 47-57.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Penerbit C.V Andi Offset.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 16(2): 70 – 84.

- OECD. 2015. Revenue Statistics in Asian Countries 2017. <http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-asian-countries-2017-9789264278943-en.htm>. [Diakses pada 6 Februari 2018].
- Puspita dan Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 3(2): 1-13.
- Rachmithasari, Annisa. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. 2(1): 37-46.
- Rahmi Fadhilah. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Rijal Saiful. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Rini Amalia Kartika. 2010. Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Riyandi, Saugy. 2017. Selain Penyumbang Terbesar PDB RI, Industri Juga Jadi Penyector Pajak Tertinggi. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com). [Diakses pada 23 Januari 2018].
- Rizal, Muhammad. 2016. Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business and Management Invention*. 5(5): 2319 – 8028.

- Santoso dan Muid. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 3(4): 2337-3806.
- Saputra dan Asyik. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(8): 2460-0585.
- Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com). [Diakses Pada 5 Oktober 2017].
- Silondae dan Ilyas. 2016. *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sirait dan Martani. 2014. Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia dan Malaysia. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Subagiastra et al. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(2): 167-193.
- Sunaryo. 2011. Analisis Pengaruh ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), Dan EPS (Earning Per Share) Terhadap Harga Saham Pada Kelompok Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia). *Binus Business Review*. 2(1): 173-180.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: mengesampingkan Hak – hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- BPKP Deputi Akuntan Negara. 2017. Good Corporate Governance. [www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp](http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp). [Diakses pada 20 Oktober 2017].
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211. Jakarta.
- Undang – Undang No. 40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756. Jakarta.
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740. Jakarta.
- Wibawa, Wilopo dan Abdillah. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 11(1).
- Wijaya Ibnu. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. [www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance](http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance). [Diakses pada 21 Oktober 2017].
- Wilson and Rego. 2011. Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. <http://ssrn.com/abstract=1337207>. [Diakses pada 22 Januari 2018].
- Zamhuri, Qumaruz. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zulkarnaen, Novriansyah. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Esensi*. 5(1).



## LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Perhitungan *Book Tax Gap*, Total Akruar dan Residual

No	Kode	Tahun	BTG	Hasil Log	Akruar	Residual
1	AS	20	Rp	12,	-	1,49
	II	14	2.612.000.00	417	0,189	0
2	BU	20	Rp	10,	-	-
	DI	14	48.209.000.00	683	0,550	0,218
3	CPI	20	Rp	11,	-	0,90
	N	14	664.980.000.000	823	0,319	5
4	DL	20	Rp	10,	-	-
	TA	14	13.737.292.000	138	0,270	0,783
5	DP	20	Rp	9,1	-	-
	NS	14	1.297.156.495	13	0,135	1,818
6	IM	20	Rp	11,	-	0,27
	PC	14	163.362.480.263	213	0,001	2
7	IN	20	Rp	11,	-	0,91
	TP	14	681.066.000.000	833	0,345	7

8	KA	20	Rp	10,	-	-
	EF	14	15.574.242.2	192	1,081	0,670
			57			
9	KL	20	Rp	11,	-	0,36
	BF	14	197.955.457.	297	0,134	5
			748			
1	RO	20	Rp	10,	-	-
0	TI	14	59.453.113.9	774	0,251	0,149
			89			
1	SC	20	Rp	9,4	-	-
1	CO	14	2.621.013.61	18	0,069	1,517
			6			
1	SM	20	Rp	12,	-	1,22
2	GR	14	1.391.794.79	144	0,312	5
			6.000			
1	SM	20	Rp	10,	-	-
3	SM	14	41.636.000.0	619	0,617	0,277
			00			
1	SRI	20	Rp	11,	-	1,01
4	L	14	818.374.812.	913	0,573	4
			500			
1	TS	20	Rp	11,	-	0,06
5	PC	14	100.059.877.	000	0,124	8
			125			
1	AS	20	Rp	12,	-	1,83
6	II	15	5.806.000.00	764	0,171	5
			0.000			

1	BU	20	Rp	10,	-	-
7	DI	15	42.439.000.0	628	0,194	0,299
			00			
1	CPI	20	Rp	10,	-	0,05
8	N	15	78.104.000.0	893	1,365	0
			00			
1	DL	20	Rp	10,	-	-
9	TA	15	17.587.570.0	245	0,329	0,672
			00			
2	DP	20	Rp	9,5	-	-
0	NS	15	3.940.626.50	96	0,272	1,326
			8			
2	IM	20	Rp	10,	-	-
1	PC	15	61.422.403.4	788	0,033	0,150
			80			
2	IN	20	Rp	11,	-	0,88
2	TP	15	632.227.000.	801	0,345	5
			000			
2	KA	20	Rp	10,	-	-
3	EF	15	27.743.592.1	443	0,133	0,488
			89			
2	KL	20	Rp	11,	-	0,12
4	BF	15	111.832.392.	049	0,196	2
			871			
2	RO	20	Rp	10,	-	-
5	TI	15	56.464.747.4	752	0,327	0,165
			12			

2	SC	20	Rp	10,	-	-
6	CO	15	12.668.315.8	103	0,322	0,815
			83			
2	SM	20	Rp	11,	-	0,90
7	GR	15	655.505.689.	817	0,379	3
			000			
2	SM	20	Rp	10,	-	-
8	SM	15	57.001.000.0	756	0,710	0,134
			00			
2	SRI	20	Rp	11,	-	0,79
9	L	15	511.459.549.	709	0,311	0
			977			
3	TS	20	Rp	9,9	-	-
0	PC	15	9.057.058.76	57	0,181	0,971
			7			
3	AS	20	Rp	12,	-	1,40
1	II	16	2.165.000.00	335	0,163	6
			0.000			
3	BU	20	Rp	10,	-	-
2	DI	16	39.760.000.0	599	0,205	0,327
			00			
3	CPI	20	Rp	11,	-	0,73
3	N	16	462.005.000.	665	0,103	1
			000			
3	DL	20	Rp	10,	-	-
4	TA	16	36.894.110.0	567	0,362	0,348
			00			

3	DP	20	Rp	9,5	-	-
5	NS	16	3.173.394.89	02	0,248	1,421
4						
3	IM	20	Rp	9,9	-	-
6	PC	16	8.177.999.49	13	0,688	0,978
6						
3	IN	20	Rp	12,	-	1,18
7	TP	16	1.251.699.00	097	0,399	6
0.000						
3	KA	20	Rp	9,3	-	-
8	EF	16	2.452.472.96	90	0,258	1,533
2						
3	KL	20	Rp	10,	-	0,01
9	BF	16	87.810.811.9	944	0,132	2
86						
4	RO	20	Rp	11,	-	0,17
0	TI	16	128.416.719.	109	0,157	9
386						
4	SC	20	Rp	10,	-	-
1	CO	16	38.176.704.4	582	0,443	0,327
18						
4	SM	20	Rp	12,	-	1,27
2	GR	16	1.504.872.19	177	0,581	9
9.000						
4	SM	20	Rp	10,	-	-
3	SM	16	31.816.000.0	503	0,458	0,405
00						

4	SRI	20	Rp	11,	-	0,75
4	L	16	472.062.169.	674	0,234	0
			302			
4	TS	20	Rp	10,	-	-
5	PC	16	21.631.897.6	335	0,132	0,596
			61			

#### Lampiran 4.2 Perhitungan Skor GCG dan ROA

No	Kode	Tahun	GCG	ROA
1	ASII	2014	0,771	0,094
2	BUDI	2014	0,543	0,012
3	CPIN	2014	0,543	0,084
4	DLTA	2014	0,543	0,290
5	DPNS	2014	0,629	0,054
6	IMPC	2014	0,438	0,167
7	INTP	2014	0,867	0,183
8	KAEF	2014	0,743	0,080
9	KLBF	2014	0,895	0,171
10	ROTI	2014	0,657	0,088
11	SCCO	2014	0,600	0,083
12	SMGR	2014	0,914	0,162
13	SMSM	2014	0,619	0,241
14	SRIL	2014	0,829	0,072

15	TSPC	2014	0,286	0,104
16	ASII	2015	0,829	0,064
17	BUDI	2015	0,571	0,006
18	CPIN	2015	0,648	0,074
19	DLTA	2015	0,590	0,185
20	DPNS	2015	0,676	0,036
21	IMPC	2015	0,724	0,077
22	INTP	2015	0,905	0,158
23	KAEF	2015	0,829	0,078
24	KLBF	2015	0,924	0,150
25	ROTI	2015	0,705	0,100
26	SCCO	2015	0,610	0,090
27	SMGR	2015	0,924	0,119
28	SMSM	2015	0,676	0,208
29	SRIL	2015	0,933	0,071
30	TSPC	2015	0,333	0,084
31	ASII	2016	0,876	0,070
32	BUDI	2016	0,695	0,013
33	CPIN	2016	0,733	0,092
34	DLTA	2016	0,638	0,212
35	DPNS	2016	0,676	0,034
36	IMPC	2016	0,705	0,055
37	INTP	2016	0,905	0,128
38	KAEF	2016	0,838	0,059
39	KLBF	2016	0,924	0,154
40	ROTI	2016	0,743	0,096
41	SCCO	2016	0,752	0,139
42	SMGR	2016	0,924	0,103

43	SMSM	2016	0,752	0,223
44	SRIL	2016	0,933	0,063
45	TSPC	2016	0,352	0,083

#### Lampiran 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviation
Unstandardized Residual	45	- 1,81807	1,83 542	,000 0000	,899328 55
IPCG	45	,286	,933	,715 56	,168437
ROA	45	,006	,290	,109 09	,063552
Valid N (listwise)	45				

#### Lampiran 4.4 Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstanda rdized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000



		Std. Deviation	,7812429
Most Extreme Differences		Absolute	,054
		Positive	,054
		Negative	-,053
		Test Statistic	,054
		Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Lampiran 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1. (Constant)	-1,980	,557		-3,553	,001		
2. IPC	2,588	,716	,485	3,612	,001	,998	1,002
3. ROA	1,172	1,899	,083	,617	,540	,998	1,002

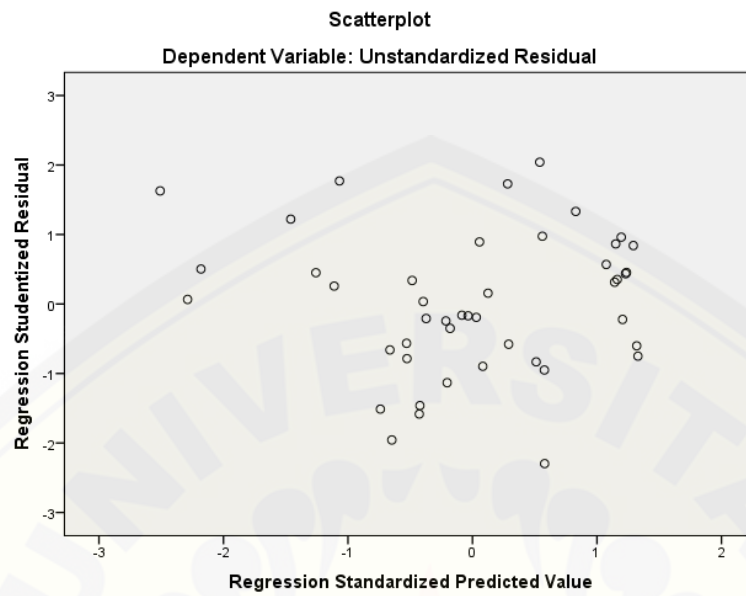
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			RO	IPC
			A	G
1	Correlat ions	R	1,0	-
		OA	00	,045
		IP	-	1,0
		CG	,045	00
nces	Covaria nces	R	3,6	-
		OA	05	,061
		IP	-	,51
		CG	,061	3

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

**Lampiran 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Lampiran 4.7 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	M	R	Adjusted	Std.	Durbin-
	R	Square	R Square	Error of the	Watson
				Estimate	
1	,49	,245	,209	,7996276	1,806
	5 <sup>a</sup>			2	

a. Predictors: (Constant), ROAD, IPCGD

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

**Lampiran 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Met hod
1	ROAD, IPCGD <sup>b</sup>	.	Enter

- a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
- b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,495 <sup>a</sup>	,245	,209	,7996276	1,806

- a. Predictors: (Constant), ROAD, IPCGD
- b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,732	2	4,366	6,828	,003 <sup>b</sup>
	Residual	26,855	42	,639		
	Total	35,587	44			

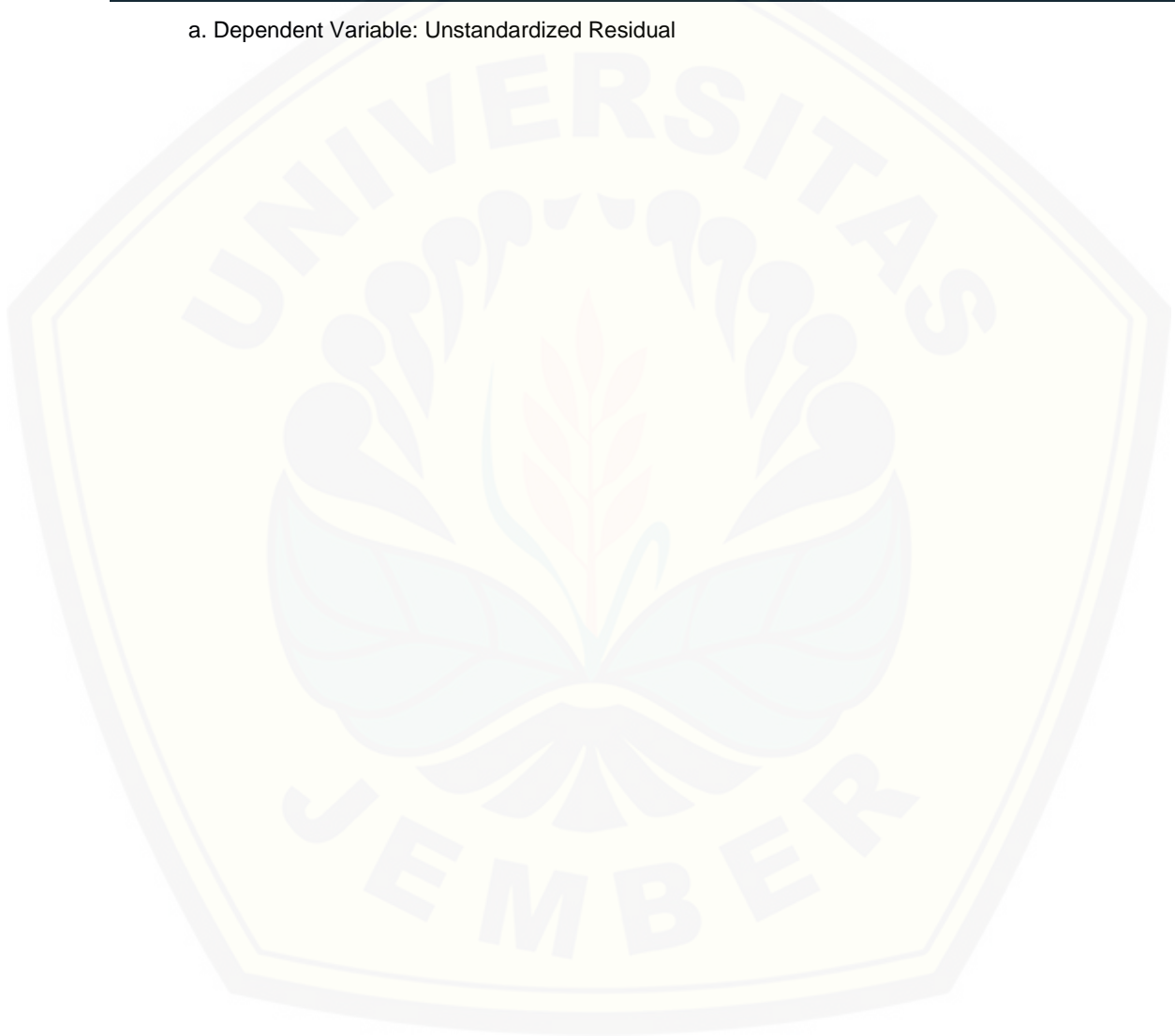
- a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
- b. Predictors: (Constant), ROAD, IPCGD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF

(Constant)	-1,980	,557	-3,553	,001			
IPC	2,588	,716	,485	3,061	,998	1,002	
RO	1,172	1,899	,083	,617	,540	,998	1,002

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual



Lampiran 4.9 Model Penilaian Indeks *Good Corporate Governance*

NO	ITEM POINT	ITEM PENGUNGKAPAN
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian mengenai hak pemegang saham</li> <li>2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham</li> <li>3. Tanggal pelaksanaan RUPS</li> <li>4. Hasil RUPS</li> </ol>
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama-nama anggota dewan komisaris</li> <li>2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen)</li> <li>3. Latar belakang pendidikan dan karier dewan komisaris</li> <li>4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris</li> <li>5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris</li> <li>6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assesment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota dewan komisaris</li> <li>7. Jumlah rapat yang dilakukan</li> <li>8. Jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat</li> <li>9. Mekanisme pengambilan keputusan</li> <li>10. Program pelatihan dewan komisaris</li> </ol>
3	Dewan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama-nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing</li> <li>2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi</li> <li>3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota direksi</li> </ol>

		<p>4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi</p> <p>Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja direksi:</p> <p>5. Mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>6. Mekanisme pendelegasian wewenang</p> <p>7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi</p> <p>8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi</p> <p>9. Jumlah kehadiran setiap anggota direksi dalam rapat</p> <p>10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota direksi</p> <p>11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi</p>
4	Komite Audit	<p>1. Nama dan jabatan anggota komite audit</p> <p>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite audit</p> <p>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite audit</p> <p>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit</p> <p>5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat</p> <p>6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit</p> <p>7. Independensi anggota komite audit</p> <p>8. Keberadaan piagam komite audit (<i>Audit Committee Charter</i>)</p>
5	Komite Nominasi Dan Remunerasi	<p>1. Nama dan jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi</p> <p>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite nominasi dan remunerasi</p> <p>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi</p> <p>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat</li> <li>6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi</li> <li>7. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi</li> </ul>
6	Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko</li> <li>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko</li> <li>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko</li> <li>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko</li> <li>5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat</li> <li>6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko</li> <li>7. Independensi anggota komite manajemen risiko</li> </ul>
7	Komite-Komite Lain yang Dimiliki Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan jabatan anggota komite</li> <li>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite</li> <li>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite</li> <li>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite</li> <li>5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat</li> <li>6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite</li> <li>7. Independensi anggota komite</li> </ul>
8	Sekretaris Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama sekretaris perusahaan</li> <li>2. Riwayat singkat sekretaris perusahaan</li> <li>3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan</li> </ul>
9	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal ( <i>Internal</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal)</li> <li>2. Jumlah anggota SPI</li> <li>3. Jabatan masing-masing anggota SPI</li> </ul>



	<i>Audit and Control)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI</li> <li>5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun</li> <li>6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan</li> </ol>
10	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan</li> <li>2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut</li> </ol>
11	Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Anggota Dewan Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok perkara/gugatan</li> <li>2. Posisi kasus</li> <li>3. Status penyelesaian perkara/gugatan</li> <li>4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan</li> </ol>
12	Akses Informasi dan Data Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misal: melalui <i>website</i>, media massa, <i>mailing list</i>, buletin, dan sebagainya</li> <li>2. Daftar penyebaran informasi kepada publik</li> </ol>
13	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>)</li> <li>2. Isi <i>code of conduct</i></li> <li>3. Penyebaran <i>code of conduct</i> kepada karyawan dan upaya penegakannya</li> <li>4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan</li> </ol>
14	Tanggung Jawab Sosial	<p>➢ Karyawan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian mengenai pengakuan hak-hak karyawan</li> <li>2. Uraian mengenai persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan</li> <li>3. Uraian mengenai jaminan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>5. Manajemen keselamatan kerja</li> <li>➤ Keberadaan peraturan keselamatan kerja</li> <li>➤ Konsumen</li> <li>6. Deskripsi mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen</li> <li>➤ Masyarakat</li> <li>7. Program kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan (program kemitraan dan pembinaan usaha kecil)</li> <li>8. Biaya yang dikeluarkan dalam program kemitraan</li> <li>Program Bina Lingkungan yang meliputi:</li> <li>9. Bantuan korban bencana alam atau bantuan sosial lainnya</li> <li>10. Bantuan pendidikan (beasiswa) dan pelatihan</li> <li>11. Pengembangan sarana umum</li> <li>12. Biaya yang dikeluarkan</li> <li>➤ Dialog dengan masyarakat</li> <li>➤ Lingkungan</li> <li>13. Komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan</li> <li>14. Program pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan</li> </ul>
15	<p>Pernyataan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG</li> <li>2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG (Manual GCG) dalam perusahaan</li> <li>3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG</li> <li>4. Keberadaan <i>Board Manual</i> (Panduan bagi komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas)</li> <li>5. Struktur tata kelola perusahaan</li> </ul>

		6. Hasil penilaian penerapan GCG dalam setahun 7. Audit GCG (jasa attestasi) oleh eksternal auditor
16	Informasi Penting Lainnya yang Berkaitan dengan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	1. Visi perusahaan 2. Misi perusahaan 3. Nilai-nilai perusahaan 4. Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris dan direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan peraturan pasar modal 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan

Sumber:

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006.
- b. Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia (KNKG,2006)